

# Manajemen Pendidikan Inklusif

(Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya)

Sunardi dan Sunaryo

Universitas Pendidikan Indonesia

## ABSTRAK

Pendidikan inklusif merupakan filosofi sekaligus strategi inovatif dalam memperluas akses dan peningkatan mutu pendidikan bagi semua tanpa diskriminasi, sehingga banyak mendapat sambutan dan apresiasi dari masyarakat luas. Dalam tataran operasional, sekalipun implementasinya semakin meluas, namun masih banyak dihadapkan kepada berbagai isu dan kendala, bahkan kesalahan praktek. Konsekuensinya, dalam perjalanan menuju pendidikan inklusi (*toward inclusive education*), pendidikan inklusif harus dikelola dengan baik, sehingga kebijakan dan implementasinya sesuai dengan konsep-konsep yang mendasarinya.

**Kata kunci:** *Inklusif, konsep, kebijakan, implementasi, isu, kendala.*

## PENDAHULUAN

Sampai saat ini belum ada angka pasti tentang jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia. Namun, yang pasti jumlah mereka yang belum memperoleh hak pendidikan masih sangat banyak. Data resmi Direktorat PSLB tahun 2007 menyebutkan bahwa jumlah ABK yang sudah mengikuti pendidikan formal baru mencapai 24,7% atau 78.689 anak dari populasi anak cacat di Indonesia, yaitu 318.600 anak (Direktorat PSLB, 2008). Ini artinya masih terdapat sebanyak 65,3% ABK yang masih terseklusi, termarginalisasikan dan terabaikan hak pendidikan. Bahkan angka tersebut diperkirakan dapat jauh lebih besar mengingat kecilnya angka prevalensi yang digunakan, yaitu 0,7% dari populasi penduduk serta masih buruknya sistem pendataan.

Kondisi di atas tentu sangat memprihatinkan, mengingat bahwa pendidikan merupakan salah satu hak azazi manusia yang paling fundamental yang dilindungi dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional maupun

nasional. UUD RI Tahun 1945 secara jelas dan tegas menjamin bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan, yang dipertegas dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maupun dalam Peraturan Mendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Disamping itu juga adanya jaminan dari berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990), Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undang-undang Penyandang Kecacatan (1997), Kerangka Aksi Dakar (2000) dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004). Semua instrumen hukum tersebut ingin memastikan bahwa semua anak, tanpa kecuali, memperoleh pendidikan.

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusi juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta upaya merubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus.

Dalam konteks pendidikan luar biasa di Indonesia, pendidikan inklusi bukanlah satu-satunya cara mendidik ABK dengan maksud untuk menggantikan pendidikan segregasi. Melainkan, suatu alternatif, pilihan, inovasi, atau terobosan/pendekatan baru disamping pendidikan segregasi yang sudah berjalan lebih dari satu abad. Hal ini dikarenakan setting pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa di Indonesia menganut pendekatan “*Multi-track Approach*”. Hanya saja eksistensi Sekolah Luar Biasa yang seharusnya mampu berperan sebagai sistem dukungan atau pusat sumber dalam implementasi pendidikan inklusif, belum diberdayakan secara maksimal.

Sekalipun secara formal pendidikan inklusi di Indonesia baru dilaksanakan dalam satu dasa warsa terakhir, namun diyakini bahwa secara alamiah pendidikan inklusi sudah berlangsung sejak lama. Hal ini tidak lepas dari faktor-faktor filosofi, sosial, maupun budaya Indonesia yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kebhinekaan atau keberagaman. Faktor-faktor ini tentu dapat menjadi modal dasar bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang sekarang sedang digalakkan.

Patut disyukuri bahwa sejak digulirkannya pendidikan inklusi di

Indonesia, sambutan dan apresiasi masyarakat sangat luar biasa, sehingga implementasinya tumbuh dan berkembang cepat di berbagai pelosok negeri. Tidak salah jika UNESCO menilai bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi ABK, Indonesia pada tahun 2007 menduduki ranking ke 58 dari 130 negara. Sayangnya, karena berbagai faktor, terutama kurangnya komitmen dan dukungan pemerintah, sehingga implementasinya belum menasional dan menyeluruh, sehingga ranking tersebut terus mengalami kemerosotan, pada tahun 2008 berada pada ranking ke 63 dan pada tahun 2009 berada pada ranking ke 71 (Kompas.com., 30 November 2009).

Dalam tataran operasional di sekolah, sekalipun sudah banyak sekolah yang mendeklarasikan sebagai sekolah inklusi, tetapi dalam implementasinya masih banyak yang belum sesuai dengan konsep-konsep yang mendasarinya. Bahkan, tidak jarang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan praktek, terutama terkait dengan aspek pemahaman, kebijakan internal sekolah, serta kurikulum dan pembelajaran. Hal ini sekaligus menyiratkan bahwa dalam perjalanan menuju pendidikan inklusi (*toward inclusive education*), Indonesia masih dihadapkan kepada berbagai isu dan dan permasalahan yang kompleks yang harus mendapatkan perhatian serius dan disikapi oleh berbagai pihak yang terkait, khususnya pemerintah sehingga tidak menghambat hakekat penyelenggaraan pendidikan inklusi itu sendiri.

Berdasarkan hal di atas, naskah ini bermaksud untuk menelaah tentang konsep pendidikan inklusi, kebijakan, dan implementasinya di lapangan dalam perspektif manajemen pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Dalam tataran implementasi, pembahasan lebih difokuskan kepada isu dan permasalahan di tingkat sekolah dan alternatif solusinya sebagai masukan.

## PEMBAHASAN

### Kerangka Pikir

Pendidikan inklusif merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan inklusif menjamin akses dan kualitas. Salah satu tujuan utama inklusi adalah mendidik anak yang berkebutuhan khusus akibat kecacatannya di kelas reguler bersama-sama dengan anak-anak lain yang non-cacat, dengan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya, di sekolah yang ada di lingkungan rumahnya.

Secara mendasar konsep dan praktek penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi ABK di berbagai belahan dunia saat ini mengacu kepada dokumen internasional Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi pada Pendidikan Kebutuhan Khusus (1994). Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa:

1. Prinsip dasar dari sekolah inklusif adalah bahwa, selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama, tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Sekolah inklusif harus mengenal dan merespon terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari para siswanya, mengakomodasi berbagai macam gaya dan kecepatan belajarnya, dan menjamin diberikannya pendidikan yang berkualitas kepada semua siswa melalui penyusunan kurikulum yang tepat, pengorganisasian yang baik, pemilihan strategi pengajaran yang tepat, pemanfaatan sumber dengan sebaik-baiknya, dan penggalangan kemitraan dengan masyarakat sekitarnya. Seyogyanya terdapat dukungan dan pelayanan yang

berkesinambungan sesuai dengan sinambungnya kebutuhan khusus yang dijumpai di tiap sekolah.

2. Di dalam sekolah inklusif, anak yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus seyogyanya menerima segala dukungan tambahan yang mereka perlukan untuk menjamin efektifnya pendidikan mereka. Pendidikan inklusif merupakan alat yang paling efektif untuk membangun solidaritas antara anak penyandang kebutuhan khusus dengan teman-teman sebayanya. Pengiriman anak secara permanen ke sekolah luar biasa atau kelas khusus atau bagian khusus di sebuah sekolah reguler seyogyanya merupakan suatu kekecualian, yang direkomendasikan hanya pada kasus-kasus tertentu di mana terdapat bukti yang jelas bahwa pendidikan di kelas reguler tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan atau sosial anak, atau bila hal tersebut diperlukan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan atau kesejahteraan anak-anak lain di sekolah itu.

Dalam dokumen di atas juga dikemukakan beberapa prinsip dasar inklusi yang fundamental, yang belum dibahas dalam dokumen-dokumen internasional sebelumnya. Beberapa konsep inti Inklusi yang tercantum dalam Pernyataan Salamanca itu meliputi:

1. Anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya.
2. Perbedaan itu normal adanya dan oleh karenanya pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak.
3. Sekolah perlu mengakomodasi semua anak.

4. Anak penyandang cacat seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
5. Partisipasi masyarakat itu sangat penting bagi inklusi.
6. Pengajaran yang terpusat pada diri anak merupakan inti dari inklusi.
7. Kurikulum yang fleksibel seyogyanya disesuaikan dengan anak, bukan sebaliknya.
8. Inklusi memerlukan sumber-sumber dan dukungan yang tepat.
9. Inklusi penting bagi harga diri manusia dan pelaksanaan hak azasi manusia secara penuh.
10. Sekolah inklusif memberikan manfaat untuk semua anak karena membantu menciptakan masyarakat yang inklusif.
11. Inklusi meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya pendidikan.
12. Sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang terbuka, membangun suatu masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua.
13. Sekolah inklusif memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi sehingga menekan biaya untuk keseluruhan sistem pendidikan.

Selanjutnya, dalam seminar Agra tahun 1998 telah dirumuskan bahwa esensi pendidikan inklusi hakekatnya: (1) lebih luas daripada pendidikan formal: mencakup pendidikan nonformal dan informal, (2) mengakui bahwa semua anak dapat belajar, (3) memungkinkan struktur, sistem dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak, (4) mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak berdasar usia, jender, etnik, bahasa,

kecacatan, status HIV/AIDS, (5) merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya, dan (6) merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif.

Alimin (2005) menjelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eksklusivitas di dalam pendidikan. Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak sesesuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif juga dapat dipandang sebagai bentuk kepedulian dalam merespon spektrum kebutuhan belajar peserta didik yang lebih luas, dengan maksud agar baik guru maupun siswa, keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman dan melihat keragaman sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, keberagaman bukan sebagai masalah. Pendidikan inklusif juga akan terus berubah secara pelan-pelan sebagai refleksi dari apa yang terjadi dalam prakteknya, dalam kenyataan, dan bahkan harus terus berubah jika pendidikan inklusif ingin tetap memiliki respon yang bernilai nyata dalam mengahapi tantangan pendidikan dan hak azasi manusia.

Meskipun defnisi tentang pendidikan inklusif itu bersifat progresif dan terus berubah, namun tetap diperlukan kejelasan konsep yang terkandung didalamnya, karena banyak orang menganggap bahwa pendidikan inkludif sebagai versi lain dari pendidikan khusus/PLB (*special esucation*). Konsep yang mendasari pendididan inklusif sangat berbeda dengan konsep yang mendasari pendikan khusus (*special education*). Inklusi atau pendidikan inklusif bukanlah istilah lain dari pendidikan khusus. Konsep pendidikan inklusif

mempunyai banyak kesamaan dengan konsep yang mendasari pendidikan untuk semua (*education for all*) dan konsep tentang perbaikan sekolah (*schools improvement*).

Definisi pendidikan inklusif yang diterima oleh banyak pihak adalah definisi yang diangkat dari seminar tentang pendidikan inklusif di Agra India tahun 1988. Dari hasil seminar itu pendidikan inklusif didefinisikan sebagai berikut:

- Lebih luas dari pada pendidikan formal, tetapi mencakup rumah, masyarakat, non-formal dan system informal
- Menghargai bahwa semua anak dapat belajar
- Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar semua anak
- Mengakui dan menghargai bahwa setiap anak memiliki perbedaan-perbedaan dalam usia, jenis kelamin, etnik, bahasa, kecacatan, status sosial ekonomi, potensi dan kemampuan
- Merupakan proses dinamis yang secara evolusi terus berkembang sejalan dengan konteks budaya
- Merupakan strategi untuk memajukan dan mewujudkan masyarakat inklusif.

Definisi di atas menggambarkan sebuah model pendidikan inklusif yang mendasarkan konsep-konsep tentang: anak, system pendidikan, keragaman dan disriminasi, proses memajukan inklusi, dan konsep tentang sumber daya. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Konsep tentang Anak

- a. Hak semua anak untuk memperoleh pendidikan di dalam masyarakatnya sendiri
- b. Semua anak dapat belajar dan anak dapat mengalami kesulitan dalam belajar

- c. Semua anak membutuhkan dukungan dalam belajar
- d. Pembelajar berpusat pada anak menguntungkan semua anak

#### 2. Konsep tentang Sistem Pendidikan dan Sekolah

- a. Pendidikan lebih luas dari pada pendidikan formal di sekolah (*formal schooling*)
- b. Fleksibel, sistem pendidikan bersifat responsif
- c. Lingkungan pendidikan ramah terhadap anak
- d. Perbaikan mutu sekolah dan sekolah yang efektif
- e. Pendekatan yang menyeluruh dan kolaborasi dengan mitra kerja

#### 3. Konsep tentang Keberagaman dan Diskriminasi

- a. Menghilangkan diskriminasi dan pengucilan (*exclusion*)
- b. Memandang keragaman sebagai sumber daya, bukan sebagai masalah
- c. Pendidikan inklusif menyiapkan siswa yang dapat menghargai perbedaan-perbeaan.

#### 4. Konsep tentang Proses Memajukan Inklusi

- a. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam inklusi
- b. Meningkatkan partisipasi nyata dari semua pihak
- c. Kolaborasi dan kemitraan
- d. Metodologi partisipatori, penelitian tindakan dan kolaboratif inkuiri

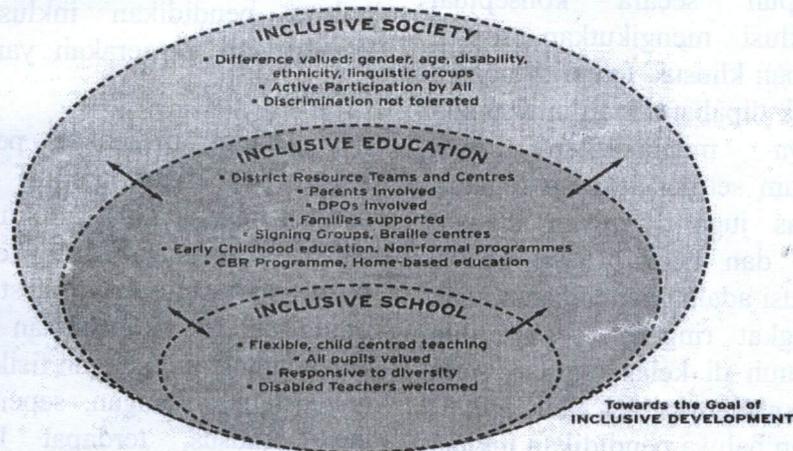
#### 5. Konsep tentang Sumberdaya

- a. Memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia (*local resources*)
- b. Mendistribusikan sumber daya yang tersedia
- c. Memandang manusia (anak, orang tua, guru, kelompok

orang yang termarginal kan dsb) sebagai sumberdaya kunci

- d. Sumberdaya yang tepat di sekolah dan masyarakat dibutuhkan untuk anak-anak yang berbeda. Sebagai contoh Braille, alat-alat bantuan (*assistive device*)

Secara konseptual terdapat perbedaan dan kaitan yang erat antara pengertian sekolah inklusif, pendidikan inklusif dan masyarakat inklusif. Pengertian dan kaitan diantara ketiganya menurut UNESCO (2004) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar Kaitan antara Sekolah Inklusif, Pendidikan Inklusif dan Masyarakat Inklusif (UNESCO, 2004)

Di Indonesia sendiri, pendidikan inklusif secara resmi didefinisikan sebagai berikut:

*Pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Direktorat PSLB, 2004).*

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan

dan/atau Bakat Istimewa, disebutkan bahwa:

*Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.*

Sedangkan dalam pasal 2 peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan inklusif bertujuan:

- (1) *memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang*

bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

- (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Pernyataan di atas, menunjukkan bahwa sekalipun secara konseptual pendidikan inklusi mengikutkan semua anak berkebutuhan khusus, tetapi di negara kita lebih banyak dipahami atau ditekankan sebagai upaya mengikutkan anak berkelainan dalam setting sekolah regular. Definisi di atas juga relevan dengan pendapat Staub dan Peck (1995) bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas regular, serta pendapat Sapon-Shevin (O'Neil, 1995) yang menyatakan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas regular bersama-sama teman seusianya, ataupun Pernyataan Salamanca (1994) dan Kerangka Aksi Dakar (1997) paragraph 4 yang menyatakan bahwa *Inclusive education seeks to address the learning needs of all children, youth and adults with a specific focus on those who are vulnerable to marginalisation and exclusion* (Unesco, 2006).

Hal di atas dapat dipahami, mengingat di negara kita hal tersebut merupakan permasalahan yang paling sensitif, kontroversial, dan mendapat tantangan paling berat, sehingga mereka merupakan kelompok yang selama ini paling tereklusi dari pendidikan umum. Pendidikan inklusi telah merubah pikiran masyarakat dengan membuka akses pendidikan bagi disabled children untuk memperoleh hak pendidikan di sekolah terdekat.

Ditinjau dari aspek implementasi, praksis pendidikan inklusi di banyak negara juga menunjukkan bahwa pendidikan

inklusif tidak terhambat oleh banyaknya jumlah siswa dalam satu kelas, kurangnya sumber daya materi, maupun ekonomi. Bahkan hambatan sikap jauh lebih besar daripada hambatan ekonomi. Tenaga ahli pendukung tidak harus tenaga tetap sekolah yang bersangkutan. Pendidikan inklusif dapat memberikan kesempatan untuk peningkatan mutu sekolah, serta fakta bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian dari pergerakan yang lebih besar menuju inklusi sosial.

Dalam perspektif pendidikan luar biasa, pendidikan inklusi akan berhasil dengan baik apabila didukung dengan: (1) sikap, komitmen, dan keyakinan yang positif dari seluruh guru, staf sekolah dan orang tua, (2) ketersediaan layanan khusus dan adaptasi lingkungan fisik dan peralatan, (3) sistem dukungan, seperti ketersediaan guru khusus, terdapat kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memonitor kemajuan setiap siswa penyandang cacat, termasuk untuk asesmen dan evaluasi, (4) adanya kolaborasi harmonis antara guru khusus dan guru kelas dalam merancang dan menerapkan Program Pengajaran yang diindividualisasikan (*individualized educational program* - IEP), (5) kurikulum fleksibel dan metode pembelajaran yang tepat, serta (7) kesadaran, partisipasi, dan dukungan masyarakat.

Berkaitan dengan hal-hal di atas, dalam praksis pendidikan inklusif, penerimaan siswa baru harus memprioritaskan penerimaan didasarkan pada lokasi terdekat pada sekolah, tidak membatasi pada jenis dan derajat kelaianan anak. Kurikulum harus disusun secara fleksibel sesuai kebutuhan anak (ABK) dan kondisi sekolah, dapat mendorong guru dan tenaga kependidikan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, mendorong pengawas untuk membina secara rutin dan kebebasan untuk berinovasi. Ditinjau dari proses pembelajaran: (1) perencanaan pembelajaran hendaknya dibuat berdasar

hasil asesmen dan dibuat bersama antara guru kelas dan guru khusus dalam bentuk program pembelajaran individual (IEP, (2) pelaksanaan pembelajaran lebih mengutamakan metode pembelajaran kooperatif dan partisipatif, memberi kesempatan yang sama dengan siswa lain, menjadi tanggung jawab bersama dan dilaksanakan secara kolaborasi antara guru khusus dan guru kelas, serta dengan menggunakan media, sumber daya dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan ABK. Sedangkan dalam evaluasi: (1) perlu penyesuaian cara, waktu dan isi kurikulum, (2) mengacu kepada hasil asesmen, (3) mempertimbangkan penggunaan Penilaian Acuan Diri, (3) dilaksanakan secara fleksibel, multimetode dan berkelanjutan, (4) secara rutin mengkomunikasikan hasilnya kepada orang tua.

Dalam kaitan dengan guru, ia hendaklah mempunyai pandangan yang positif terhadap anak dan pendidikannya, sensitif dan proaktif terhadap kebutuhan ABK, peduli terhadap kemajuan belajarnya, kreatif, memiliki kompetensi yang cukup memadai, serta terbuka untuk diskusi, menerima masukan, dan berkolaborasi. Kolaborasi tersebut mulai dari pelaksanaan asesmen, pembuatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang disertai dengan pembagian peran, tugas, dan tanggungjawab dalam pembelajaran. Kolaborasi dalam mencari cara-cara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta pengadaan media dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi ABK.

Dalam kaitan dengan sistem dukungan, terdapat beberapa peran orang tua, sekolah khusus (SLB) dan pemerintah yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Orang tua dituntut dapat berpartisipasi aktif dalam pembuatan rencana pembelajaran, pengadaan alat, media, dan sumber daya yang dibutuhkan sekolah. Aktif

berkomunikasi dan berkonsultasi tentang permasalahan dan kemajuan belajar anaknya, kolaborasi dalam mengatasi hambatan belajar anaknya, serta pengembangan potensi anak melalui program-program lain di luar sekolah.

2. SLB dituntut mampu berperan sebagai pusat sumber guna membantu melayani kebutuhan informasi dan konsultasi bagi sekolah, dalam memahami kebutuhan khusus ABK dan layanan pembelajaran, serta dalam pengadaan guru khusus, sosialisasi, dan pendampingan.

3. Pemerintah dituntut untuk membantu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan internal sekolah, meningkatkan kualitas guru dan ktenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan di bidang pendidikan inklusi, menyediakan guru khusus, memberikan subsidi berupa bantuan anggaran khusus dan dalam pengadaan media, alat, dan sarana khusus yang dibutuhkan sekolah, program pendampingan, monitoring dan evaluasi program, maupun dalam sosialisasi ke masyarakat luas.

### *Perkembangan Pendidikan Inklusi di Indonesia*

Proses menuju pendidikan inklusif bagi anak luar biasa di Indonesia hakekatnya sudah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1960-an yang ditandai dengan berhasil diterimanya beberapa lulusan SLB Tunanetra di Bandung masuk ke sekolah umum, meskipun ada upaya penolakan dari pihak sekolah. Lambat-laun terjadi perubahan sikap masyarakat terhadap kecacatan dan beberapa sekolah umum bersedia menerima siswa tunanetra. Selanjutnya, pada akhir tahun 1970-an pemerintah mulai menaruh perhatian terhadap pentingnya pendidikan integrasi, dan mengundang Helen Keller International, Inc. untuk membantu

mengembangkan sekolah integrasi. Keberhasilan proyek ini telah menyebabkan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat. Sayangnya, ketika proyek pendidikan integrasi itu berakhir, implementasi pendidikan integrasi semakin kurang dipraktekkan, terutama di jenjang SD. Pada akhir tahun 1990-an upaya baru dilakukan lagi untuk mengembangkan pendidikan inklusif melalui proyek kerjasama antara Depdiknas dan pemerintah Norwegia di bawah manajemen Braillo Norway dan Direktorat PLB (Tarsidi, 2007).

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif bagi penyandang cacat, pada tahun 2002 pemerintah secara resmi mulai melakukan proyek ujicoba di di berbagai 9 propinsi yang memiliki pusat sumber dan sejak saat itu lebih dari 1500 siswa berkelainan telah bersekolah di sekolah reguler, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.000 siswa atau 5,11% dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 7,5% atau 15.181 siswa yang tersebar pada 796 sekolah inklusif yang terdiri dari 17 TK, 648 SD, 75 SLTP, dan 56 SLTA.

Selanjutnya untuk mendorong implementasi pendidikan inklusi secara lebih luas, pada tahun 2004 di Bandung diadakan lokakarya nasional yang menghasilkan Deklarasi Bandung, yang diantara isinya menghimbau kepada pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri serta masyarakat untuk dapat menjamin setiap

anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan, serta mendapatkan perlakuan yang manusiawi.

Guna terus mengembangkan pendidikan inklusi pemerintah juga telah mengambil berbagai strategi, baik melalui diseminasi ideologi pendidikan inklusif, mengubah peranan SLB yang ada agar menjadi pusat sumber, penataran/pelatihan bagi guru-guru SLB maupun guru-guru sekolah reguler, reorientasi pendidikan guru LPTK, desentralisasi dalam implementasi pendidikan inklusif, pembentukan kelompok kerja pendidikan inklusi, samapai pada pembukaan program magister dalam bidang inklusi dan pendidikan kebutuhan khusus. Hasilnya pada kisaran tahun 2004-2007 muncul apresiasi dan antusiasme kuat di kalangan masyarakat untuk mengimplementasikannya. Misal, pada tahun 2005 cukup banyak sekolah regular yang mengajukan untuk menjadi sekolah inklusi, yakni 1200 sekolah, tetapi yang disetujui oleh pemerintah untuk dilaksanakan baru 504 sekolah, karena konsekuensinya pemerintah harus memberikan subsidi dan fasilitas lain penunjang proses pembelajaran (Sukadari, 2006). Meningkatnya implementasi pendidikan inklusi waktu itu, menjadikan Indonesia (menurut UNESCO) berada pada ranking ranking ke 58 dari 130 negara dalam implementasi pendidikan inklusi. Sayang ranking tersebut kemudian terus merosot dalam tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya, trend perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia sejak tahun 2004 dapat ditabelkan sebagai berikut:

Table 1  
Trend Pendidikan Inklusif Di Indonesia Berdasar  
Jumlah Sekolah dan Siswa  
Tahun: 2004 - 2007

Tahun	Jumlah sekolah Inklusif	Jumlah Siswa
2004	467	2.573
2005	504	6.000
2006	600	9.492
2007	796	15.181

Sunardi (2009)

Tabel 2  
Jumlah Siswa Berkelainan yang Bersekolah di Sekolah Inklusif  
Berdasar Jenis Kelainan Tahun 2007

Jenis Kelainan	Jumlah Siswa
Tunanetra	345
Tunarungu	291
Tunagrahita	2277
Tunadaksa	266
Tunalaras	291
Autisme	230
Cacat ganda	45
Berkesulitan Belajar	11428
Lainnya	32
Total	15.181

Sunardi (2009)

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah inklusif di Indonesia (81,40%) adalah pada SD. Namun, bila dibandingkan dengan jumlah seluruh SD yang ada di Indonesia yaitu 144.567, maka jumlah seluruh SD inklusi di Indonesia sebenarnya baru mencapai 0,44%. Selanjutnya, dengan mengambil angka kasar jumlah penyandang cacat usia sekolah di Indonesia adalah 1,5 juta, maka jumlah anak berkelainan yang terlayani pendidikannya melalui sekolah inklusi sebenarnya baru mencapai 1 % dari seluruh populasi yang ada. Namun dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki

Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, yang didalamnya menegaskan bahwa setiap Pemerintah kabupaten/kota untuk menunjuk paling sedikit 1 (satu) SD dan 1 (satu) SMP pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, maka diyakini jumlah anak berkelainan dan jumlah sekolah penyelenggara inklusif di Indonesia akan semakin meningkat.

#### *Problema Pendidikan Inklusif*

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional di Indonesia, sampai saat ini implementasi pendidikan inklusi masih dihadapkan kepada berbagai

problema yang apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan-kebijakan khusus memungkinkan dapat menghalangi perlakuan adil dan akses anak berkelainan untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler terdekat sehingga menghambat keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi. Menurut Sunardi (2009), problema tersebut meliputi:

- a. Sistem Penerimaan Siswa Baru, khususnya di tingkat pendidikan menengah dan atas yang menggunakan nilai ujian nasional sebagai kriteria penerimaan. Siswa hanya dapat diterima kalau hasil ujian nasionalnya memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah.
- b. Dijadikannya pencapaian hasil ujian nasional sebagai criteria sekolah bermutu, bukan diukur dari kemampuannya dalam mengoptimalkan kemampuan siswa secara komprehensif sesuai dengan keragamannya.
- c. Penggunaan label sekolah inklusi dan adanya PP.No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 41(1) tentang keharusan untuk memiliki tenaga kependidikan khusus bagi sekolah inklusi sebagai alasan melakukan penolakan masuknya anak berkelainan ke sekolah yang bersangkutan, yang berarti akan mendorong munculnya gejala “*eklusivisme baru*”, yaitu menolak anak berkebutuhan khusus dengan alasan belum memiliki tenaga khusus atau sekolahnya bukan sekolah inklusi.
- d. Kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini belum mengakomodasi keberadaan anak – anak yang memiliki perbedaan kemampuan (*difabel*).
- e. Masih dipahaminya pendidikan inklusi secara dangkal, yaitu semata-

mata memasukkan anak disabled children ke sekolah reguler, tanpa upaya untuk mengakomodasi kebutuhan khususnya. Kondisi ini dapat menjadikan anak tetap terklusi dari lingkungan karena anak merasa tersisih, terisolasi, ditolak, tidak nyaman, sedih, marah, dan sebagainya. Pada hal makna inklusi adalah ketika lingkungan kelas atau sekolah mampu memberikan rasa senang, menerima, ramah, bersahabat, peduli, mencintai, menghargai, serta hidup dan belajar dalam kebersamaan.

- f. Munculnya label-label khusus yang sengaja diciptakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang cenderung membentuk sikap eksklusifisme, seperti Sekolah Unggulan, Sekolah Berstandar Internasional (SBI), Sekolah Rintisan Berstandar Internasional (RSBI), sekolah favorit, sekolah percontohan, kelas akselerasi, serta sekolah-sekolah yang berbasis agama. Kondisi ini tentu dapat berdampak kepada sekolah inklusi sebagai sekolah kelas dua (*second class*), karena menerima ABK sama dengan *special school* (Imam Subkhan, 2009)
- g. Masih terbatasnya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan inklusi secara matang dan komprehensif, baik dari aspek sosialisasi, penyiapan sumber daya, maupun uji coba metode pembelajaran, sehingga hanya terkesan program eksperimental (Cak Fu, 2005).

#### *Isu dan Permasalahan yang dihadapi*

Sekalipun perkembangan pendidikan inklusi di negara kita cukup menggembirakan dan mendapat apresiasi dan antusiasme dari berbagai kalangan, terutama para praktisi pendidikan, namun sejauh ini dalam tataran implementasinya di

lapangan masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian Sunardi (2009) terhadap 12 sekolah penyelenggara inklusi di Kabupaten dan Kota Bandung, secara umum saat ini terdapat lima kelompok issue dan permasalahan pendidikan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat, implementasinya tidak bias, atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusi itu sendiri, yaitu : pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan support system. Salah satu bagian penting dari support system adalah tentang penyiapan anak. Selanjutnya, berdasar isu-isu tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

#### *Pemahaman inklusi dan implikasinya*

- 1) Pendidikan inklusif bagi anak berkelainan/penyandang cacat belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Masih dipahami sebagai upaya memasukkan *disabled children* ke sekolah regular dalam rangka pemberian hak pendidikan dan kemudahan akses, serta sikap anti diskriminasi.
- 2) Pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah.
- 3) Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap *proactive* dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan *komplain* orang tua, dan menjadikan anak cacat sebagai bahan olok-olokan.

#### *Kebijakan sekolah*

- 1) *Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak cacat, sebagian sudah memiliki guru khusus,*

mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing ABK, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun cenderung *belum* didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait.

- 2) *Masih terdapat kebijakan yang kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar ABK, serta keharusan orang tua ABK dalam penyediaan guru khusus.*

#### *Proses pembelajaran*

- 1) Proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk *team teaching*, tidak dilakukan secara terkoordinasi.
- 2) Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan kurikulum fleksibel, pembuatan IEP, dan dalam menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran.
- 3) Masih terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya serta anggapan bahwa siswa cacat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar.
- 4) Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, *resource*, dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak.
- 5) Belum adanya panduan yang jelas tentang system penilaian. Sistem penilaian belum menggunakan pendekatan yang fleksibel dan beragam.
- 6) Masih terdapat persepsi bahwa system penilaian hasil belajar ABK sama dengan anak normal lainnya, sehingga berkembang anggapan

bahwa mereka tidak menunjukkan kemajuna belajar yang berarti.

#### Kondisi guru

- 1) Belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Guru kelas masih dipandang belum sensitif dan proaktif terhadap anak berkebutuhan khusus.
- 2) Keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK.
- 3) Belum didukung dengan kejelasan aturan tentang peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing guru.
- 4) Pelaksanaan tugas belum disertai dengan diskusi rutin, tersedianya model kolaborasi sebagai panduan, serta dukungan anggaran yang memadai.

#### Sistem dukungan

- 1) Belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi – LPTK PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu fasilitas sekolah juga masih terbatas.
- 2) Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi, belum terbina dengan baik. Dampaknya, orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistik terhadap anaknya.
- 3) Peran SLB yang diharapkan mampu berfungsi sebagai *resource centre* bagi sekolah-sekolah inklusi di lingkungannya, belum dapat dilaksanakan secara optimal, baik karena belum adanya koordinasi dan kerja sama maupun alasan geografik.
- 4) Peran ahli yang diharapkan dapat berfungsi sebagai media konsultasi, advokasi, dan pengembangan SDM sekolah masih sangat minimal.

- 5) LPTK PLB dalam diseminasi hasil penelitian, penelitian kolaborasi maupun dalam implementasi terhadap hasil-hasil penelitaian belum dapat diwujudkan dengan baik.
- 6) Peran pemerintah yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam mendorong implementasi inklusi secara baik dan benar melalui regulasi aturan maupun bantuan teknis, dinilai masih kurang perhatian dan kurang proaktif terhadap permasalahan nyata di lapangan.
- 7) Walaupun pemerintah saat ini sudah mengikutkan guru-guru dalam pelatihan atau memberikan bantuan yang sifatnya fisik atau keuangan, namun jumlahnya masih sangat terbatas dan belum merata.
- 8) Sekolah umumnya juga belum didukung fasilitas yang diperlukan untuk mendukung aksesibilitas dan keberhasilan pembelajaran secara memadai.

Hasil-hasil penelitian tentang isu dan permasalahan pendidikan inklusi di atas, sejalan dengan hasil penelitian Juang Sunanto (2009) terhadap dua Sekolah Dasar inklusi di kota Bandung. Pertama, sekolah yang secara alami mengembangkan pendidikan inklusif, tanpa predikat inklusif, misinya kemanusiaan, dan kini memiliki 10 siswa with disabilities. Kedua, sekolah percontohan inklusif, ditunjuk resmi sebagai sekolah inklusif oleh pemerintah, dan kini memiliki 32 siswa disabilitas. Hasilnya, dapat diringkas sebagai dibawah ini.

Pada sekolah yang secara alami mengembangkan pendidikan inklusif, beberapa kecenderungan yang terjadi di lapangan, diantaranya:

- Secara formal belum berpredikat sebagai sekolah inklusif, bahkan sampai sekarang belum tersentuh

- proyek sosialisasi dan pelatihan di bidang pendidikan inklusi
- Para guru awalnya sempat khawatir akan menurunkan citra sekolah.
  - Adanya protes terhadap kenaikan ABK, sementara ada anak normal yang tidak naik kelas.
  - Tidak ada guru khusus, tetapi ini justru tantangan untuk menemukan metode baru (kreatif) melalui kebersamaan, saling diskusi, saling berbagai.
  - Perubahan dan proses adaptasi pembelajaran dilakukan terus menerus melalui kerja sama, saling memotivasi, saling membantu, saling mendukung, komunikasi, dan belajar dari pengalaman.
  - Mengembangkan kerjasama antar guru dan meningkatkan jalinan komunikasi dengan orang tua.
  - Sekalipun diakui menambah beban tambahan, namun diterima sebagai tantangan.
  - Pembelajaran children with disabilities dilakukan secara tersendiri, dengan menciptakan suasana yang memungkinkan semuanya dapat belajar, serta penerapan pendekatan perhatian dan kasih sayang.

Sedangkan pada sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah percontohan inklusi, hal-hal menarik yang terjadi di sekolah ini, diantaranya :

- Awalnya berjalan alami, kemudian ditunjuk resmi sebagai sekolah inklusif oleh pemerintah. Awalnya mendapat bantuan 1 orang guru pendamping atau guru khusus, tapi kemudian keluar. Akhirnya muncul inisiatif dari orang tua untuk membawa sendiri guru pendamping untuk anaknya dan fenomena ini terus berkembang sampai sekarang dan

- bahkan menjadi persyaratan yang harus dipenuhi orang tua.
- Pembelajaran pada ABK yang awalnya diterima sebagai tantangan oleh guru kelas, kini bergeser kepada ketergantungan pada guru khusus atau guru pendamping. Kondisi ini menjadikan kreativitas guru tidak berkembang.
- Kebijakan menjadikan sebagai sekolah berpredikat inklusi dan banyaknya pelatihan yang diterima justru menjadikan semakin tidak jelas, bahkan bias. Penataran /pelatihan yang diterima belum banyak berdampak di kelas dan belum memberi solusi terhadap permasalahan pendidikan yang dihadapi.
- Motivasi, kerja sama dalam mengatasi masalah tidak tampak, sebab seluruh aktivitas belajar ABK mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi diserahkan sepenuhnya kepada guru pendamping.
- Inklusi dimaknai sekedar memasukkan ABK ke kelas regular, belajar dengan materi, guru, dan cara masing-masing. ABK belum ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas dan aktivitas di dalam kelas. Masih sebagai “tamun”, diterima secara pasif.
- Kebijakan sekolah menetapkan bahwa urusan ABK adalah urusan guru pendamping, sepenuhnya menjadi wewenang guru pendamping. Pembuatan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasinya tidak dilakukan melalui kolaborasi dan kerja sama.
- Rencana pembelajaran untuk disabled children dibuat oleh guru khusus berdasar hasil asesmen dan dituangkan dalam format Program pengajaran individual, kemudian

disatukan dengan rencana pembelajaran guru kelas.

- Guru pendamping yang notabene memiliki latar belakang pendidikan PLB belum memiliki keberanian untuk meluruskan sesuai konsepnya.
- Sekalipun sekolah melayani keberagaman siswa, termasuk ABK, namun sebenarnya sekolah tersebut telah tumbuh menjadi sekolah eksklusif, karena memiliki syarat khusus, sehingga hakekatnya telah bias dan tumbuh menjadi sekolah inklusif yang keluar dari prinsip-prinsip inklusif.

Uraian di atas memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia, khususnya di Bandung masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang cukup kompleks dan sifatnya masih mendasar, terutama terkait dengan pemahaman inklusi itu sendiri dan implementasinya di lapangan, kebijakan pemerintah dan kepala sekolah, pembinaan profesional guru, proses pembelajaran, system dukungan, maupun penyiapan siswa. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa sekolah yang secara resmi telah berpredikat sebagai

sekolah inklusi, bahkan sekolah percontohan sekalipun, belum menjamin bahwa sekolah tersebut telah melaksanakan pendidikan inklusi secara benar dan baik sesuai dengan konsep-konsep pendidikan inklusi yang mendasarinya.

Dengan mempertimbangkan masih banyaknya isu dan permasalahan dalam pendidikan inklusi di Indonesia saat ini, maka penting bagi pemerintah untuk segera menindaklanjutinya, diantaranya melalui kegiatan pengkajian (monitoring dan evaluasi) secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia dan hasilnya dijadikan rujukan untuk membuat langkah-langkah strategis menuju pendidikan inklusi, peninjauan kembali kebijakan di tingkat sekolah, perumusan model-model inklusi, penggiatan program pendampingan, pemberdayaan LPTK PLB sebagai pusat sumber dan dalam pendampingan, mengganti pola penataran – pelatihan guru dari model ceramah kepada model *lesson study* atau minimal memasukkan *lesson study* sebagai bagian inti dari penataran-pelatihan guru, pembuatan buku-buku pedoman, serta menggalakkan program sosialisasi dan desiminasi.

## KESIMPULAN

Pendidikan inklusi yang menekankan kepada persamaan hak dan akses pendidikan yang bermutu kepada setiap warga negara, tanpa kecuali, hakekatnya adalah visi baru di bidang pendidikan sebagai bagian dari reformasi politik yang menekankan kepada pilar demokrasi, HAM, otonomi, desentralisasi, dan akuntabilitas.

Dalam konteks pendidikan luar biasa, pendidikan inklusif merupakan paradigma baru dalam pendidikan bagi penyandang cacat yang diilhami dan didorong oleh berbagai dokumen internasional, khususnya tentang pendidikan untuk semua serta Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi

mengenai pendidikan berkebutuhan khusus tahun 1994.

Sekalipun perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia saat ini semakin diterima dan berkembang cukup pesat, namun dalam tataran implementasinya masih dihadapkan kepada berbagai problema, isu, dan permasalahan yang harus disikapi secara bijak sehingga implementasinya tidak menghambat upaya dan proses menuju pendidikan inklusif itu sendiri serta selaras dengan filosofi dan konsep-konsep yang mendasarinya. Untuk itu diperlukan komitmen tinggi dan kerja keras melalui kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk

mengatasinya. Dengan demikian, tujuan akhir dari semua upaya di atas yaitu kesejahteraan para penyandang cacat dalam

memperoleh segala haknya sebagai warga negara dapat direalisasikan secara cepat dan maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alimin, Z. (2005). *Memahami Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus*. Makalah tidak diterbitkan. Bandung: Jurusan PLB FIP UPI.
- Convention on the Rights of the Child. United Nations General Assembly resolution 44/25, 20 November 1989*
- Mitchell, D. (2006). *Special Education Needs and Inclusive Education: Major Themes in Education*, New York : Publisher's Note. <http://books.google.co.jp/books?id=-b69gCu5Ywes-C&pg=PA200&lpg=PA200&dq>
- NISE (2007). *Final Report of the 27<sup>th</sup> Asia-Pacific International Seminar on Education for Individuals with Special Needs: Advancement of Education to Meet the Special Needs of Individuals toward Realization of Principle of Equity and Social Cohesion. 3-6 December 2007, Yokohama, Japan.* [http://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/kankobutsu/pub\\_d/d-266.pdf](http://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/kankobutsu/pub_d/d-266.pdf)
- Smith, J. D. (1998). *Inclusion: School for All Students*. New York: Wadsworth Publishing Company.
- Somad, P. and Z. Alimin. (2004). *Reorientasi Pemahaman Konsep Special Education dan Implikasinya ke Konsep Special Needs Education terhadap Layanan Pendidikan*. *Jurnal Jassi anakku* 3, no. 1: 15-21. Bandung: Jurusan PLB FIP UPI
- Stubs, S. (2002). *Inclusive Education Where There Are Few Resources*. Oslo: The Atlas Alliance.
- Sujarwanto. (2004). *Inclusive Education in Indonesia: Lessons from Japanese Special Education Models*. Tsukuba: CRICED University of Tsukuba
- Sukadari. (2006). *Peran Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkelainan*. Jakarta: Madina. [http://www.madina-sk.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=812&Itemid=10](http://www.madina-sk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=812&Itemid=10)
- Sunanto, Juang. (2009). *Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar*. Bandung: Pusat Kajian dan Inovasi Pendidikan – Sekolah Pasca Sarjana UPI.
- Sunardi (2009). *Issues and Problems on Implementation of Inclusive Education for Disable Children In Indonesia*. Tsukuba: CRICED – University of Tsukuba.
- Tarsidi, D. (2003). *The implementation of Inclusive Education in Indonesia. Makalah disajikan pada The 8th International Congress on Including Children with Disabilities in the Community*. Stavanger, Norway, 15-17 Juni 2003.
- Tarsidi, Didi. (2004). *Implementation of Inclusive Education in Indonesia*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. [http://d-tarsidi.blogspot.com/2007/07/inclusiv\\_educationindonesia.html](http://d-tarsidi.blogspot.com/2007/07/inclusiv_educationindonesia.html)
- Taylor, G. R. (2006). *Trends in Special Education Projections for the Next Decade*. Ontario: The Edwin Mellen Press.
- The Council for Exceptional Children (1993). *Including Students with*

- Disabilities in General Classrooms.* ERIC EC Digest #E521. The ERIC Clearing House on Disabilities and Gifted Education.
- The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education.* Salamanca: UNESCO & Ministry Of Education And Science, Spain.
- The World Declaration on Education For All (1990). *Meeting Basic Learning Needs.* Jomtien, Thailand: The World Bank, UNESCO, UNICEF & UNDP.
- UNESCO (2000). *Education For All: Meeting Our Collective Commitments, Text adopted by the World Education Forum, Dakar, Senegal, 26-28 April 2000.* [http://www.unesco.org/education/efa/ed\\_for\\_all/dakframeng.shtml](http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/dakframeng.shtml)
- \_\_\_\_\_. (2000). *The Dakar Framework for Action Education for All: Meeting Our Collective Commitment, the World Education Forum.* <http://www.unesco.org/education/wef/en-conf/dakframeng.shtm>
- \_\_\_\_\_. (2008). *Report Regional Preparatory Conference on "Inclusive Education: Major Policy Issues in the Asia Pacific Region", Bali, 29-31 May 2008.* [http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/userupload/COPs/News\\_documents/2008/0805Bali/Bali\\_Report.pdf](http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/userupload/COPs/News_documents/2008/0805Bali/Bali_Report.pdf)
- United Nations. (1993). *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities.* <http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm>